

**Meningkatkan Mutu Anak Usia Dini
Melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif
Pada Tahun 2015**

Ratih Permata Sari
Dosen FKIP Universitas Negeri Jember
Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto, Jember
ratihpspaud@yahoo.com

Ahmad
Mahasiswa Program Doktor Universitas Negeri Jakarta
ahmadbima03@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membahas perkembangan pendidikan anak usia dini yang bermutu di masa yang akan datang dengan pendekatan analisis referensi dari berbagai sumber rujukan. Pembahasan utama dalam tulisan ini adalah meningkatkan mutu usia dini melalui pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) pada tahun 2015 dengan beberapa indikator antara lain: 1) Efektivitas Program Satu Desa Satu PAUD, Keberadaan Bunda PAUD, dan Partisipasi dari Komunitas Masyarakat penyelenggara program PAUD dalam mendongkrak capaian APK PAUD 68,1% di tahun 2014, 2) Adanya kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikan keorangtuaan (parenting education). Secara umum melalui program pendidikan anak usia dini holistik integratif berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini di Indonesia.

Kata kunci: Pendidikan Anak Usia Dini, Angka Partisipasi Kasar, Holistik, Integratif, Pendidikan Keorangtuaan

Pendahuluan

Pengembangan Pendidikan sejak usia dini merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk merespon tantangan bonus demografi (2010-2035) yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk Indonesia usia 0-6 tahun mencapai 18,5 juta jiwa dari 245,4 juta penduduk Indonesia (PDSP: 2013). Dengan peningkatan jumlah generasi bangsa tersebut menjadi spirit tersendiri bagi pemerintah untuk melindungi, memenuhi hajat hidup anak bangsa melalui program pendidikan supaya menjadi generasi cerdas, mandiri dan terampil. Undang-undang Tahun Nomor 23 Tahun 2002 berisi tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa Anak sebagai warga negara memiliki hak yang sama dalam perlindungannya yang tertera dalam pasal 1 ayat 2, Perlindungan anak adalah segala aktivitas untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

State of the World's Mothers 2014			
Saving Mothers and Children in Humanitarian Crises			
Rank	Country	Rank	Country
1	Finland	113	Indonesia
2	Norway	170	Chad
3	Sweden	171	Nigeria
4	Iceland	172	Sierra Leone
5	Netherlands	173	Central African Republic
6	Denmark	174	Guinea-Bissau
7	Spain	175	Mali & Niger
8	Germany	177	DR Congo
9	Australia & Belgium	178	Somalia



Hasil kajian State of the World's Mothers 2014 memperkuat bahwa Indonesia berada di peringkat ke 113 dari 178 negara untuk menjadi ibu. Artinya Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam meningkatkan kehidupan ibu dan anak dalam 15 tahun terakhir. Karena di era globalisasi ini, dibutuhkan manusia yang berkualitas lepas landas yang modern dan berjiwa "generasi pencipta".

Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Riane Eisler (2000), bahwa *Tomorrow's children will have the potential to create a new era of evolution*. Anak-anak masa depan akan mempunyai potensi untuk menciptakan evolusi baru. Anak-anak masa depan, adalah anak-anak yang sejak dini memerlukan perhatian yang khusus untuk mengembangkannya. Ini disebabkan karena mereka belum mampu untuk berkembang secara mandiri sesuai dengan karakteristik perkembangannya.

Anak usia dini merupakan kelompok usia yang berada dalam proses perkembangan yang unik karena proses perkembangannya terjadi bersamaan dengan masa peka (*golden age*). Bredekamp (1992: 1) berpendapat *golden age* anak usia dini terjadi antara 0 tahun sampai 8 tahun. Dengan demikian, *Golden age* merupakan masa yang tepat untuk menggali segala potensi kecerdasan anak sebanyak-banyaknya. Pada masa ini seorang anak memiliki potensi yang sangat besar untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan yang ada pada dirinya. Perkembangan anak adalah kajian tentang bagaimana anak berubah seiring waktu dari lahir sampai dengan delapan tahun. Sebagaimana pendapat Morrison (2012: 60) teori anak adalah pernyataan prinsip-prinsip dan gagasan-gagasan yang mencoba menjelaskan kejadian-kejadian dan bagaimana hal-hal terjadi yaitu mempelajari lebih banyak tentang pendidikan anak usia dini.

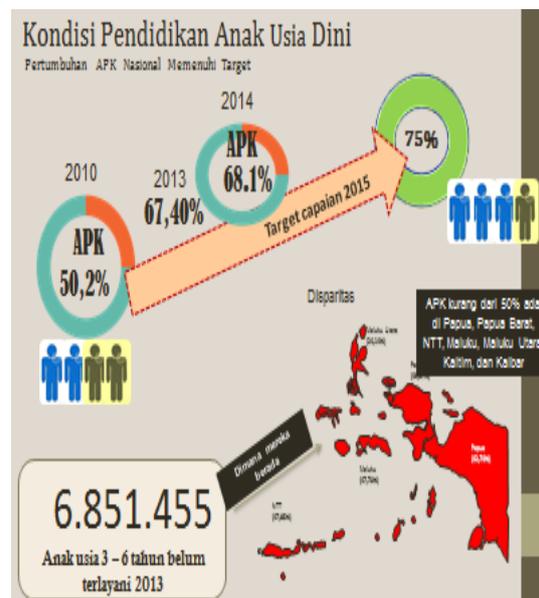
Hakikat anak usia dini dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 28 ayat 1 (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003: 20) berbunyi Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Maria Montessori dalam Elizabeth B. Hurlock, (1978) berpendapat bahwa usia 3 - 6 tahun merupakan periode sensitif atau masa peka pada anak, yaitu suatu periode dimana suatu fungsi tertentu perlu dirangsang, diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Langkah yang dilakukan adalah melalui pendidikan yang terformat dalam program-program strategis yang dapat membentuk kepribadian dan karakter anak sejak dini dengan memberikan stimulasi-

stimulasi yang tepat sehingga terbentuk dasar-dasar pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap mental pada anak.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 14, menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara sadar dan bertanggung jawab untuk memberikan pengaruh positif pada anak usia dini. Pengaruh yang positif ini harus diberikan pada anak usia dini dengan menggunakan program yang terencana, sistematis dan berkelanjutan dalam bentuk interaksi edukatif antara pendidik dan anak.

Program pendidikan anak usia dini harus disusun secara sistematis bermakna bahwa ada bahan-bahan pengembangan yang sudah berurut dan diklasifikasikan sesuai dengan program ranah perkembangan potensi anak. Pendidikan anak usia dini dapat dipandang juga sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik sedini mungkin melalui bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Sejak tahun 2010, capaian APK PAUD Indonesia sebesar 50,2%, kemudian meningkat menjadi 67,4% pada tahun 2013, kemudian meningkat menjadi 68,1% tahun 2014 dengan target 75% pada tahun 2015. Oleh sebab itu, yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia kedepannya adalah untuk melayani anak usia PAUD sebanyak 6,85 Juta Jiwa supaya terlayani PAUD yang tersebar pada tujuh provinsi yaitu Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.



Masih tingginya anak PAUD yang belum terlayani tetap menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia, walaupun diketahui prestasi Indonesia pada tahun 2011 yang mampu menurunkan dari angka 13,3 juta anak usia dini yang belum terlayani PAUD di tahun 2010. Perkembangan pendidikan anak usia dini memberi pengaruh terhadap jumlah anak terlayani PAUD yang masuk SD mengalami peningkatan sebesar 1,46%, dari 113,87% pada tahun 2010, menjadi 115,33% pada tahun 2012. Kedepannya pengembangan program PAUD akan menekankan pada kesiapan siswa SD

dan yang mempengaruhi peningkatan kinerja siswa. Walaupun masih terdapat variasi yang cukup signifikan pada masing-masing provinsi.

Menyadari bahwa Pengembangan Anak Usia Dini menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah, maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu. Bronfenbrenner (1979) dengan teori ekologi, perkembangan anak yang dipengaruhi oleh sistem interaksi yang kompleks dengan berbagai tingkatan lingkungan sekitarnya yang mencakup interaksi yang saling berhubungan antara di dalam dan di luar rumah, sekolah dan tetangga dari kehidupan anak setiap hari dalam kurun waktu yang sangat lama. Interaksi ini menjadi motor atau penggerak perkembangan anak yang merupakan pusat dari lingkaran, dikelilingi oleh berbagai sistem interaksi yang terdiri dari sistem mikro, sistem meso, sistem exo dan sistem makro.

Bronfenbrenner (1990) mengatakan bahwa anak dapat mengalami perkembangan yang positif bila dipenuhi lima hal. Pertama, anak membutuhkan interaksi timbal balik yang semakin kompleks, dan dilakukan selama hidup anak dengan seseorang atau beberapa orang dewasa yang membuat anak dapat mengembangkan kedekatan emosi yang kuat untuk mengembangkan anak menjadi manusia yang cerdas dan unggul. Kedua, hubungan interpersonal yang sangat kuat tersebut meningkatkan respon anak terhadap lingkungan fisik dan sosial terdekatnya sehingga mempercepat pertumbuhan psikologis anak. Ketiga, pemantapan dan pemeliharaan pola-pola interaksi dan kedekatan emosi antara pengasuh dan anak perlu didukung, dibantu dan dihargai oleh pihak ketiga dan bahkan pihak ketiga tersebut ikut pula dalam pengasuhan anak. Keempat, proses pengasuhan anak yang efektif dalam keluarga dan tatanan lain bagi anak, membutuhkan saling bertukar informasi yang terjadi terus-menerus, dan saling percaya dalam lingkungan utama anak dengan lingkungan dimana orangtua berada. Tatanan atau lingkungan ini adalah rumah, Tempat Penitipan Anak (*day care center*) dan tempat bekerja orangtua. Kelima, proses pengasuhan anak yang efektif dalam keluarga dan tatanan lain bagi anak, membutuhkan kebijakan publik dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung pengasuhan anak bukan hanya dalam bentuk orangtua, pengasuh, guru-guru, dan petugas profesional lainnya tetapi juga dalam bentuk teman-teman, kerabat, komunitas, dan lembaga-lembaga ekonomi, politik dan sosial dari keseluruhan masyarakat.

Melalui pandangan tersebut diharapkan adanya integrasi Penanganan PAUD yang dapat menghasilkan keterpaduan dalam pelaksanaan PAUD di lapangan yang didukung oleh sumber-sumber dan dukungan teknis dari instansi terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing. Oleh sebab itu pada tahun 2013 pendidikan anak usia dini terfokus pada pengembangan PAUD melalui prinsip pemberdayaan masyarakat dan *community participation* yang telah berlangsung sejak tahun 2008 dengan jumlah peserta didik PAUD sampai tahun akademik 2012/2013 mencapai 4 juta jiwa yang tersebar dari 175.388 lembaga penyelenggara PAUD, artinya pada tahun 2012 capaian lembaga penyelenggara PAUD sudah mencapai

49,55%. Capaian ini sebagai akibat dari besarnya penyelenggara TK formal yang dikelola oleh swasta untuk menunjang semangat program *community participation* tersebut.

Pada tahun 2011, perluasan dan pemerataan akses pelayanan PAUD terus menjadi perhatian serius pemerintah, sebagai hasilnya meningkatnya APM PAUD menjadi 99,55% di tahun 2011. Jika dibandingkan pada tahun 1999, APM PAUD berada pada angka 94%, artinya ada peningkatan 0,82% APM PAUD dalam 12 (dua belas tahun) terakhir. Capaian ini dipengaruhi dengan adanya perhatian pemerintah dengan langkah pemberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat miskin dengan menerapkan pelaksanaan PAUD yang murah dan mudah terjangkau tapi tetap bermutu pada masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut permasalahan yang mendasar sehingga terpikirkan untuk menerbitkan tulisan ini yaitu: 1) Bagaimana bentuk program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses dan layanan PAUD di Indonesia?, dan 2) Model PAUD seperti apa yang perlu dikembangkan untuk menunjang program PAUDISASI di Indonesia?.

Hakekat PAUD adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan Anak Usia Dini memberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadian anak, oleh karena itu lembaga pendidikan anak usia dini perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang meliputi kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik dan motorik. Peranan lembaga pendidikan formal maupun nonformal sangat diharapkan untuk membentuk karakter manusia Indonesia sejak dini.

Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pembahasan makalah ini adalah metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dari studi literatur atau pustaka yang ditemukan oleh penulis. Sumber data tentang (1) angka partisipasi, (2) Jumlah lembaga PAUD, (3) Jumlah Peserta didik PAUD, (4) Program-Program Penunjang Keberhasilan PAUD, (5) Dokumen penunjang analisis kendala serta tantangan PAUD yang diolah dan dianalisis secara proporsional berdasarkan analisis situasi saat ini dan masa yang akan datang.

Hasil Kajian dan Pembahasan

1. Analisis Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini Saat Ini

Indonesia memiliki suatu komitmen yang tinggi untuk mensukseskan agenda Dakkar yang terformat dalam bentuk Program Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*) yang salah satu sarasannya

adalah memperluas akses dan layanan pendidikan anak usia dini. Data Indeks Pembangunan Pendidikan untuk Semua (PUS) atau *The Education for All Development Index* (EDI) Indonesia tahun 2013 berada pada peringkat 54 dari 115 negara. Peringkat ini lebih baik dibanding capaian 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2011 berada pada peringkat 69 dari 127 negara dan pada peringkat 64 dari 120 negara pada tahun 2012. Namun kondisi tersebut sebenarnya masih belum menggembirakan karena Indonesia seharusnya dapat mencapai lebih dari peringkat tersebut.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar PAUD yang terbagi menjadi 4 kategori standar antara lain: 1) Standar tingkat pencapaian perkembangan, 2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 3) Standar Isi, Proses, dan Penilaian, dan 4) Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, dan pembiayaan. Berdasarkan standar tersebut, pemerintah dapat mengetahui ketercapaian setiap program yang telah dikembangkan sebagai bentuk evaluasi diri lembaga guna menunjang pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, tidak terkecuali dengan memenuhi kaidah evaluasi diri tersebut, capaian PUS maupun EDI dapat diketahui efektivitas program yang telah dikembangkan.

Untuk memacu peningkatan APK PAUD, pemerintah telah menggelar sejumlah program salah satunya adalah Program Satu Desa Satu PAUD. Melalui program ini desa-desa yang belum memiliki PAUD akan memperoleh bantuan dana dari pemerintah. Pada tahun 2013, telah dialokasikan bantuan untuk 1.491 rintisan PAUD baru dengan bantuan masing-masing 45 juta rupiah per lembaga. Selain itu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses dan layanan PAUD adalah dengan mengembangkan program Bunda PAUD. Bunda PAUD merupakan istri pejabat/muspida terkait yang berfungsi untuk menggerakkan program PAUD di masing-masing wilayah. Sehingga sampai tahun 2014 tingkat ketuntasan nasional untuk program satu desa satu PAUD sudah mencapai 69,8 % artinya masih terdapat 30,2 % (24.937 desa yang belum memiliki PAUD), namun dari 188.088 lembaga PAUD yang ada, masih sangat perlu ditingkatkan kualitasnya.

Tingginya partisipasi pemerintahan desa/kelurahan untuk menunjang program layanan PAUD merupakan buah dari intensnya koordinasi dan sosialisasi pemerintah akan pentingnya keberadaan layanan PAUD ke masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan layanan pendidikan penduduk perkotaan dan perdesaan. Selain itu juga, keberadaan layanan PAUD di desa dapat memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini yang lebih merata dan bermutu agar semua potensi anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat usia sehingga mereka memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses dan layanan PAUD adalah dengan memberdayakan masyarakat baik

secara mandiri maupun institusi swasta untuk mengembangkan PAUD. Pola kerjanya pemerintah berkoordinasi dan memobilisasi masyarakat untuk mengembangkan PAUD mandiri dan dibina langsung oleh pemerintah, sedangkan pada institusi swasta juga melakukan sosialisasi guna pemberdayaan dana responsif sosial perusahaan dalam bentuk dana CSR untuk mengembangkan PAUD. Upaya demikian merupakan bentuk kemitraan pemerintah dengan masyarakat sebagai elemen penting pembangunan.

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain masih adanya beberapa daerah yang belum memiliki lembaga PAUD terutama daerah 3T (terpencil, terdepan, dan terluar), masih banyaknya masyarakat yang enggan memasukkan anaknya ke lembaga PAUD, karena tidak ada peraturan yang mengharuskan masuk Sekolah Dasar harus belajar di PAUD, dan banyaknya usia PAUD yang telah bersekolah di Sekolah Dasar, karena para orangtua lebih senang memasukkan anaknya masuk ke jenjang Sekolah Dasar tanpa melalui jenjang PAUD. Aspek kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD masih belum memenuhi standar, diperlukan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Dari 276.576 PTK PAUD formal (TK) yang ada, baru 69.366 orang atau 25,92% yang berkualifikasi S1/D4, sedangkan untuk PTK PAUD Nonformal (KB, TPA, dan SPS) dari 85.690 orang yang ada, telah berkualifikasi S1/D4 baru 10.889 orang 12,71%.

Dengan sejumlah keberhasilan tersebut, tentu tidak melupakan tantangan pengembangan PAUD kedepannya yakni dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut: 1) sebagai kelanjutan program satu PAUD satu desa, pemerintah diharapkan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas PAUD terintegrasi sebagai lembaga pembina PAUD pada umumnya, 2) Memaksimalkan peran aktif pemerintah daerah lebih-lebih daerah-daerah tertentu yang masih rendah kesadaran masyarakatnya akan pendidikan Anak usia dini dengan melakukan sosialisasi, konsolidasi percepatan dan peningkatan pendidikan anak usia dini, 3) Diharapkan untuk mengintensifkan peranan lembaga PAUD pembina dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, 4) Mengalokasikan anggaran pendidikan yang relevan dan akuntabel sesuai kebutuhan pendidikan anak usia dini, dan 5) Perlu terbentuknya pendidikan anak usia dini terintegrasi dalam skala nasional yang sekaligus mampu memberikan layanan pendidikan pada anak usia dini.

2. Analisis Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Masa yang Akan Datang

Tantangan utama pengembangan anak usia dini di Indonesia antara lain adalah masih keterbatasan pemahaman para pemangku kepentingan, terutama para pengambil kebijakan dan masyarakat tentang pentingnya Pengembangan Anak Usia Dini, terbatasnya kualitas dan jangkauan pelayanan, serta disparitas pelayanan antar wilayah. Kasus kekurangan

gizi pada anak balita masih sangat tinggi, pendidikan dan pengasuhan anak tidak dilakukan secara optimal dan anak belum sepenuhnya terlindung dari lingkungan dapat menghambat tumbuh kembang anak. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia untuk menempatkan pengembangan anak usia dini sebagai prioritas pembangunan sehingga semua anak dari seluruh strata sosial ekonomi mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensinya.

Mempelajari seluruh perkembangan ini, pengembangan anak usia dini di Indonesia perlu dilakukan secara holistik, dan terintegrasi yang mencakup peningkatan kesehatan dan gizi, pendidikan, serta aspek pengasuhan dan perlindungan. RPJMN tahun 2010-2015 merupakan wahana yang akan memberi ruang yang luas untuk pelaksanaan penyiapan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dalam kerangka penghapusan kemiskinan yang dimulai dari pengembangan anak usia dini. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah Pengembangan anak usia dini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak agar tumbuh kembang optimal sesuai dengan potensinya menjadi anak sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Aspek pengembangan anak usia dini holistik-integratif meliputi aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Kebutuhan esensial anak meliputi pengasuhan dan perawatan anak dengan penuh kasih sayang, pemeliharaan kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, stimulasi tumbuh kembang, kesempatan bermain dan berekreasi serta perlindungan anak.

Salah satu prinsip dasar dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini holistik-integratif adalah menyediakan pendidikan bagi orang tua dan pengasuh melalui Pendidikan kecakapan keorang-tuaan (*parenting education*). Pendidikan kecakapan keorang-tuaan merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan pendidikan masyarakat berkaitan dengan kecakapan keorangtuaan untuk pendidikan karakter dalam keluarga, mencegah risiko kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak marjinal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum termasuk pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga.

Dinamika kehidupan yang terus berkembang membawa konsekuensi dan tuntutan keluarga terhadap nilai-nilai dan pandangan tentang fungsi dan peran keluarga. Orang tua sebagai kepala keluarga diharapkan dapat melaksanakan fungsi edukasi, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan dalam keluarga. Orang tua diharapkan mampu menjadi pelaku pendidikan yang dapat diteladani, penanggung jawab ketahanan ekonomi dan sosial serta bertanggungjawab terhadap kecerdasan anaknya, pembentukan perilaku, karakter, budaya

dan hubungan sosial kemasyarakatan. Orang tua harus mampu mendesain kurikulum keluarga yang mampu mengintegrasikan dengan kurikulum pendidikan anak di sekolah, sehingga relevansi kurikulum sekolah dan keluarga bagi anak sangat dirasakan manfaat dan hasilnya terhadap tumbuh kembang anak.

Oleh sebab itu, untuk menjalankan berbagai fungsi tersebut diperlukan kemampuan dari setiap orang tua yang dapat dilatihkan melalui pendidikan keorangtuaan. Pada tahun 2013, terdapat 224 kab/kota atau 45,07% secara nasional telah menyelenggarakan program pendidikan keorangtuaan (LAKIP PAUDNI: 2013). Masih rendahnya capaian pendidikan parenting tersebut karena layanan yang diberikan masih bersifat parsial, sedangkan idealnya dalam proses pemberian pendidikan dilakukan dalam bentuk layanan pengembangan anak usia dini tersedia lengkap, terintegrasi, sinergi, dan dilaksanakan pada satu tempat. Tipologi parenting inilah yang menjadi rujukan strategis dalam pengembangan pendidikan anak usia dini holistik-integratif.

Tantangan serta kendala lain yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan anak usia dini holistik-integratif yaitu: (1) Kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana lembaga layanan PAUDHI masih belum memadai; (2) Perlunya peningkatan/pelatihan SDM penyelenggara layanan dalam memberikan layanan yang holistik-integratif; (3) Kurangnya pemahaman keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya pola asuh dalam pembentukan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, menjadi SDM yang mampu bersaing dengan bangsa lainnya; dan (4) Faktor kemiskinan dan tingkat pendidikan yang relatif rendah menyebabkan kurangnya fungsi dan ketahanan keluarga yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup dan tumbuh kembang anak usia dini.

Kesimpulan

Pendidikan yang berkualitas sejak usia dini merupakan investasi termahal untuk menciptakan generasi tangguh/emas pada tahun 2045. Target pemerintah ini sangatlah rasional, oleh sebab itu pemerintah sangat aktif mengembangkan karakter anak bangsa melalui program-program strategis yang dikembangkan, salah satunya adalah melalui program pendidikan anak usia dini holistik-integratif (PAUDHI). Melalui PAUDHI adanya peningkatan kualitas pertumbuhan dan perkembangan: kecerdasan fisik (olah tubuh), kecerdasan spiritual (olah hati), kecerdasan emosi (olah rasa), kecerdasan intelektual (olah pikir) sejak dini.

Pembelajaran sejak janin bertujuan untuk membentuk smart baby, happy baby, and moral baby sampai dengan usia 6 tahun melalui PAUD Holistik dan Integratif. Oleh sebab itu, perlu adanya pemerataan pelaksanaan PAUD yang terstandar dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan layanan PAUD antara Desa dan Kota melalui pengembangan

Piloting PAUDHI pada masing-masing kabupaten/kotamadya. Keberadaan PAUDHI setiap wilayah ini berfungsi sebagai lembaga pembina dan pengarah pelaksanaan PAUD di desa-desa.

Selain itu pula pemerataan komposisi guru yang standar mutu sangat mempengaruhi proses belajar anak, oleh karena itu pemerintah terus mengembangkan program peningkatan kualifikasi PTK PAUD dengan beasiswa pada LPTK dan peningkatan kompetensi tutor PAUD Nonformal pada lembaga PAUD terakreditasi. Selain melakukan pengembangan sumber daya manusianya, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang relevan dengan tahap tumbuh kembang anak dan memberdayakan merupakan salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan karakteristik anak.

Referensi

Bronfenbrenner., Urie. 1979. *The Ecology of Human Development Experiments by Nature and Design*. Cambridge: Harvard University Press.

_____. 1990. *Ökologische Sozialisationsforschung*. In: L. Kruse, C. F. Graumann & E. D. Lantermann (Hrsg.), *Ökologische Psychologie* (S. 76-79). Stuttgart: Enke

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Informal Kemdikbud. 2014. Laporan *Education for All*. Jakarta: Ditjen PAUDNI Kemdikbud.

_____. 2014. Laporan *Education Developmen Index* Indonesia. Jakarta: Ditjen PAUDNI Kemdikbud.

_____. 2014. Laporan *Education Developmen Index* Indonesia. Jakarta: Ditjen PAUDNI Kemdikbud.

_____. 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Ditjen PAUDNI. Jakarta: Ditjen PAUDNI Kemdikbud.

Hurlock., Elizabeth B. 1978. *Perkembangan Anak.*, terjemahan Meitasari Tjandrasa dan Soedjarwo, Jilid II Edisi-IV. Jakarta: Erlangga.

Laporan Tahunan Save the Children - State of the World's Mothers. 2013. Ibu Indonesia Peringkat 113 Terbaik di Dunia. Berita Satu.Com. Selasa, 06 Mei 2014 | 13:32 diakses <http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/182311-ibu-indonesia-peringkat-113-terbaik-di-dunia.html> 1 Desember 2014 pukul 02.27 WIB.

Morrison., George S. 2012. Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Edisi Kelima. Jakarta: Indeks.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pusat Data Statistik Pendidikan. 2013. Data Pokok Pendidikan. Jakarta: PDSP Kemdikbud.

Riane Eisler. 2000. Tomorrow's Children. Colorado: Westview Press.

Sue Bredekamp. 1992. Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Program Serving Children From Birth Through Age 8. Washington DC: NAEYC.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.